

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir semua negara di dunia mempunyai persoalan tersendiri pada negaranya masing-masing dimana persoalan yang dihadapi oleh setiap negara pun ada banyak jenisnya, contohnya masalah kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, dan masalah lingkungan. Di negara Indonesia masalah lingkungan masih menjadi masalah utama yang belum teratasi dimana salah satunya yakni masalah sampah. Sampah ialah segala hal yang tidak terpakai, tidak disukai, bahkan perlu dibuang, serta sampah berasal dari aktivitas penduduk (Hardiyanti & Ari, 2019).

Permasalahan sampah masih menjadi isu mendasar di semua Kabupaten/Kota di Indonesia karena kesulitan dalam mengelola sampah, terutama di daerah perkotaan. Pengelolaan sampah di kota dihadapkan pada sejumlah kesulitan dan tantangan yang signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah harus segera memperbaiki pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah termasuk masalah yang serius bagi ekosistem lingkungan, limbah produksi, sampah rumah tangga, bahan kimia lainnya yang tidak dilakukan pemilahan dahulu, dibuang secara langsung dan sembarangan ke sungai akan mendatangkan akibat bencana seperti banjir dan kerusakan lingkungan. Sampah yang datang dari sungai kemudian berakhir di lautan bisa merusak kehidupan lautan serta biota laut.

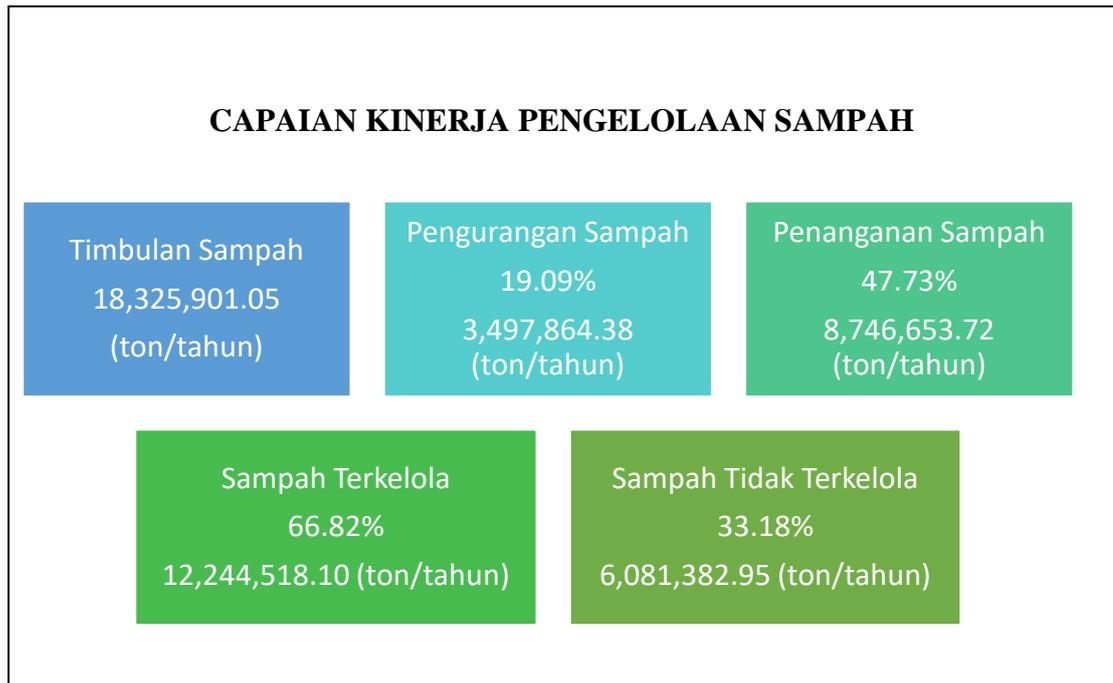
Berdasarkan UU 18/2008 pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa pengolahan sampah yakni aktivitas secara runtut, menyeluruh, dan berkaitan satu sama lain mencakup diantaranya mengurangi dan menangani sampah. Mengurangi sampah bisa dilaksanakan dengan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat, seperti membuat kerajinan tangan dari bungkus makanan, serta memanfaatkan kembali sampah sementara menangani sampah bisa dilaksanakan dengan memilah sampah melalui pemisahan dan pengelompokan sampah sesuai sifat sampah, jenis sampah, serta jumlahnya; mengumpulkan sampah berupa pengambilan dan memindahkan sampah dari sumbernya menuju lokasi penampungan sementara; mengangkut sampah berupa pengangkutan dari tempat asalnya atau tempat penampungan sementara menuju lokasi pemrosesan akhir, mengolah sampah berupa proses pengolahan sampah melibatkan transformasi atau pengelolaan kembali sampah atau residu dari langkah-langkah sebelumnya, sehingga dapat dilepaskan ke lingkungan dengan cara yang aman (Haerani et al., 2019).

Di tahun 2017 melewati Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, pemerintah menerbitkan suatu rancangan strategis sebagaimana tertera pada PP 97/2017 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” yang selanjutnya disebut Jakstranas. Regulasi tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menentukan target dari pengelolaan sampah ditahun 2025 yang hendak diraih sebesar 100% sampah dapat dikendalikan dengan benar dan baik. Target tersebut diukur dengan mencapai mengurangi jumlah sampah sebesar 30% dan menangani sejumlah 70%

dari total sampah. Berikut ini adalah pencapaian dari kinerja pengelolaan sampah di Indonesia di tahun 2022.

Gambar 1.1

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Indonesia

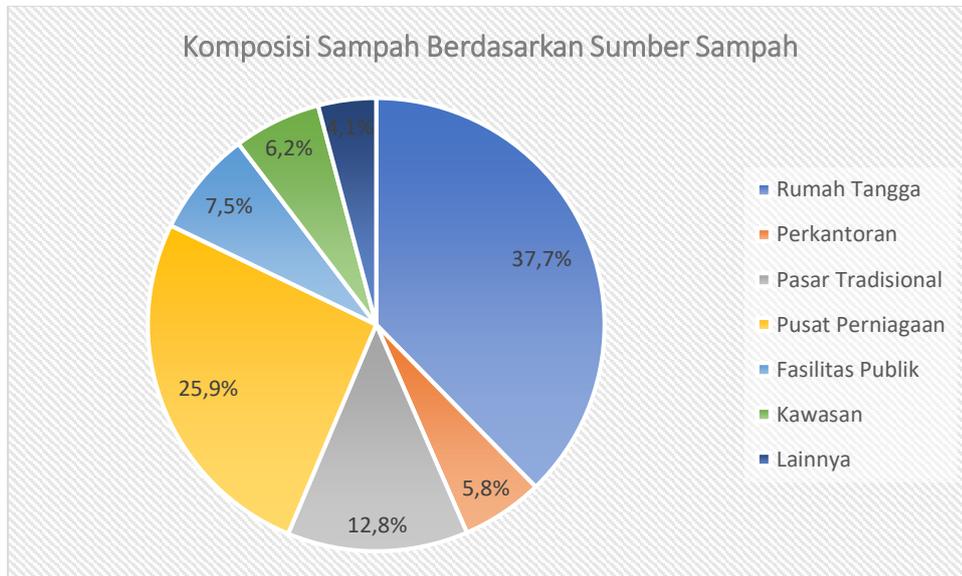


Sumber : SIPSAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 yang didapat melalui *website* SIPSAN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pengelolaan sampah adalah capaian mengurangi serta menangani sampah. Pencapaian kinerja pengelolaan sampah pada gambar diatas dilaksanakan pada tahun 2022 yang dilakukan oleh 186 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terdiri dari timbulan sampah, mengurangi sampah, menangani sampah, sampah terkelola, serta sampah tidak terkelola.

Gambar 1.2

Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah



Sumber : SIPSN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Presentase total komposisi sampah pada tahun 2022 menurut sumbernya pada gambar 1.2 terdiri dari sampah rumah tangga sebagai penyumbang sampah paling tinggi yaitu 37.7%. Kemudian sampah perniagaan sebesar 25.9 %, pasar tradisional sebesar 12.8%, sampah fasilitas penduduk sebesar 7.5%, sampah kawasan sebesar 6.2%, sampah perkantoran sebesar 5.8%, dan sampah lainnya sebesar 4.1%.

Salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menghadapi tantangan serius dalam hal masalah persampahan adalah Kabupaten Demak, yang terdiri dari 14 Kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Sebagai upaya menghadapi masalah persampahan. Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mana di Kabupaten Demak sendiri tertuang di Perbub 58/2018 tentang “Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”. Peraturan tersebut sebagai arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada penelitian ini akan berfokus pada arah kebijakan pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah yang tercantum pada Perbup 58/2018 mencakup pertama, sampah rumah tangga yang datang melalui aktivitas keseharian rumah tangga tidak tercantum diantaranya tinja dan bahan spesifik. Kedua, sejenisnya yang datang dari wilayah khusus, komersial, industri dan berbagai fasilitas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan pihak implementor dalam penyelenggaraan Perbup 58/2018. Di dalam penyelenggaraannya, Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus pada mengurangi sampah dan menangani sampah dimana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan ini bertujuan dalam rangka persoalan sampah yang ada pada Kabupaten Demak dapat diatasi dengan maksimal namun nyatanya implementasi kebijakan ini belum sempurna akibat beberapa masalah.

Permasalahan pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Demak terus mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 – 2022. Berikut data yang ditemukan :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak (Tahun 2019 – 2022)

| NO | TAHUN | JUMLAH PENDUDUK |
|-----------|--------------|------------------------|
| 1. | 2019 | 1.162.805 jiwa |
| 2. | 2020 | 1.203.956 jiwa |
| 3. | 2021 | 1.212.377 jiwa |
| 4. | 2022 | 1.223.217 jiwa |

Sumber : BPS Kabupaten Demak

Berdasarkan tabel 1.1 yang didapat melalui *website* BPS Kabupaten Demak, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Demak mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kenaikan penduduk yang signifikan serta wujud konsumsi publik yang berubah – ubah berimplikasi terhadap adanya masalah sampah.. Persoalan sampah seharusnya dapat diatasi secara baik serta baiknya penanganannya mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan masyarakat, dan lainnya dalam rangka untuk merubah sikap serta pola hidup masyarakat. Amanat pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 menjelaskan dimana semua orang mempunyai hak atas kesejahteraan lahir maupun batin, tempat tinggal dan mempunyai pola hidup baik dan sehat, serta akses pelayanan sektor kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berarti bahwa masyarakat terlibat secara sukarela dan aktif dalam seluruh proses pengelolaan sampah (Armadi, 2021). Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah dimana hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3

Gambar 1.3
Kurangnya Partisipasi Masyarakat



Sumber : Observasi Lapangan, 2023

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah yang mana meskipun sudah ada kontainer bak sampah tetapi masyarakat masih membuang sampah diluar kontainer bak sampah. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Bapak Eko Pringgolaksito dalam Tribunjateng (24/6/2023) terkait DLH Demak turunkan sifersampah untuk atasi penumpukan sampah sembari edukasi masyarakat yang mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan padahal sudah disediakan tempatnya.

Memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan sampah adalah cara terbaik untuk mengelola sampah. Kepedulian masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah mengatasi masalah sampah. Pengelolaan sampah harus memperhatikan perspektif dan tindakan masyarakat. Masyarakat harus dimotivasi untuk mengelola sampah, termasuk sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Masyarakat adalah penghasil sampah terbesar sehingga peran mereka sangat penting.

Permasalahan es jumbo yang sedang marak saat ini dapat memperparah permasalahan sampah plastik. Berdasarkan observasi penulis, di sepanjang jalan di Kabupaten Demak banyak dijumpai pedagang es jumbo dimana biasanya pedagang es jumbo di kemas menggunakan kemasan gelas plastik sekali pakai. Hal tersebut dapat berpotensi menambah gunung sampah plastik serta menjadi masalah besar karena Kabupaten Demak belum memiliki kemampuan untuk mengubah sampah plastik menjadi produk yang dapat di jual.

Mengurangi sampah termasuk diantaranya sampah yang dibatasi, sampah yang didaur ulang, serta sampah yang dimanfaatkan kembali pada Kabupaten Demak saat ini belum secara keseluruhan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimana sebagian ada yang diatur oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian lagi ada yang diatur oleh pemulung. Berdasarkan data menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak persentase pengurangan sampah pada tahun 2022 sebesar 29,02%. Jumlah pembatasan timbulan sampah sekitar 5.583,00 ton, jumlah daur ulang sampah sekitar 70.464 ton, serta jumlah pemanfaatan kembali sampah sekitar 476,544 ton. Sedangkan persentase penanganan sampah pada tahun 2022 sebesar 63,96%. Meskipun pengurangan sampah dan penanganan sampah sudah tercapai dimana mencapai 63,96% tetapi pengurangan sampah belum bisa berjalan dengan optimal sementara penanganan sampah ini masih dikumpulkan di TPA sehingga sampah yang dikelola masih belum memenuhi standarisasi pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan pembangunan dua pengolahan sampah. Di tahun 2024 akan dibangun pengolahan sampah plastik yang dibuat untuk pemecah gelombang atau APO. APO adalah sejenis cetakan yang akan diolah dari sampah plastik dan akan dicampur dengan beton untuk mengatasi rob yang ada di Desa Timbulsloko. Sementara pada tahun 2023 akan dibangun hanggar budidaya makanan maggot.

Kabupaten Demak mempunyai tiga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Kalikondang TPA Candisari Mranggen, dan TPA Berahan Kulon Wedung. TPA Kalikondang dan TPA Candisari menerapkan metode pengelolaan sampah

yang dikenal sebagai *open dumping*. *Open dumping* merupakan mekanisme pembuangan sampah yang dilaksanakan dengan terbuka sehingga dapat mendatangkan permasalahan. Pada lahan pembuangan sampah secara ada beberapa masalah yang dapat muncul, seperti berbagai jenis kuman dan hama penyebab penyakit yang bisa berkembang biak, gas metana akibat dari membusuknya sampah organik yang mampu mendistribusikan baunya melewati udara dan gas yang mudah untuk terbakar, serta cairan yang terbaaur dengan sampah dapat meresap ke tanah dan mencemari air tanah dimana resapan tersebut dapat mengandung zat berbahaya untuk lingkungan maupun kesehatan. Kondisi TPA Kalikondang pada tahun 2020 ditutup akibat sudah *overload* sedangkan TPA Candisari ditutup sementara akibat di demo oleh masyarakat setempat. Sementara itu, TPA Berahan Kulon merupakan TPA yang berdiri pada tahun 2021 dimana TPA Berahan Kulon pada tahun 2021 pembangunannya diarahkan menjadi TPA modern dengan sistem *sanitary landfill*. Sistem *sanitary landfill* yakni mekanisme untuk mengelola serta memusnahkan sampah melalui pembuangan serta penumpukan pada wilayah cekung, memadatkannya, lalu menimbunnya dengan tanah. Namun, faktanya TPA Berahan Kulon yang awalnya diarahkan menjadi TPA modern dengan sistem *sanitary landfill* harus terhenti akibat keterbatasan anggaran. Hal tersebut mengakibatkan TPA Berahan Kulon beroperasi dengan menggunakan sistem *open dumping*.

Tabel 1.2

Pengelolaan Sampah di TPA Berahan Kulon Wedung Tahun 2022

| BULAN | SAMPAH MASUK TPA (Kg) | SAMPAH MASUK TPA (TON) | RATA-RATA/HARI (Kg) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Januari | 1.545.140,00 | 1545,14 | 51504,67 |
| Februari | 1.238.960,00 | 1238,96 | 41298,67 |
| Maret | 1.502.850,00 | 1502,85 | 50095,00 |
| April | 1.368.740,00 | 1368,74 | 45624,67 |
| Mei | 2.021.120,00 | 2021,12 | 67370,67 |
| Juni | 2.229.130,00 | 2229,13 | 74304,33 |
| Juli | 2.206.730,00 | 2206,73 | 73557,67 |
| Agustus | 2.150.190,00 | 2150,19 | 71673,00 |
| September | 1.836.800,00 | 1836,80 | 61226,66667 |
| Oktober | 1.576.940,00 | 1576,94 | 52564,66667 |
| November | - | 0,00 | 0 |
| Desember | - | 0,00 | 0 |
| Jumlah Timbulan | 17.676.600,00 | 17676,60 | 589.220,00 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di TPA Berahan Kulon Wedung pada tahun 2022 sampah yang masuk TPA sekitar 17.676.600 Kg dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan rata-rata perharinya mencapai sekitar 589.220 Kg/hari. Dalam hal ini berkenaan banyaknya timbulan sampah yang dibuat setiap hari, ada sisa sampah yang tidak terangkut sekitar 24,47% dari ton sampah yang terangkut dan 75,53% dari sisa sampah tidak terangkut. Pengangkutan sampah di Kabupaten Demak menggunakan kontainer dilaksanakan 1 *shift* menuju TPA Berahan Kulon. Dinas Lingkungan Hidup belum bisa melayani pembuangan siang dan malam dikarenakan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Hal ini didukung oleh pernyataan Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas (18/09/2023) yang mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak memiliki sumber daya manusia yang sangat terbatas

sekali menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa melayani 1 *shift* pembuangan belum bisa melakukan *shift* siang dan malam sedangkan armada yang dimiliki armada amrol hanya 8, *drum truck* 3, dan kol 1 serta kondisi armada ada yang cukup tua umurnya sehingga menyebabkan berbagai kendala.

Pembuangan dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu, mulai jam 07.00 hingga 16.00 dan hari Minggu dari jam 07.00 hingga 14.00 dimana diluar jam tersebut Dinas Lingkungan Hidup tidak melayani pembuangan untuk ketertiban dalam pengelolaan sampah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa driver pengangkut sampah tetapi ada yang tidak tertib, seperti driver yang melakukan pembuangan dan pengambilan sampah di malam hari atau pagi buta. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kenyamanan masyarakat jalur pembuangan. Kondisi jalur pembuangan di TPA Berahan Kulon sangat sempit dan sangat padat arusnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya gesekan – gesekan.

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya peneliti tertarik untuk menyelidiki dan mengeksplorasi **“Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak”**.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Peningkatan pertumbuhan penduduk
2. Kurangnya partisipasi masyarakat
3. Maraknya penggunaan plastik sekali berupa minuman kemasan
4. TPA menggunakan sistem *open dumping*.

5. Keterbatasan sumber daya

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak?.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan di Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam peningkatan dan pengayaan pengetahuan serta pemahaman dalam konteks studi ilmiah di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam pengembangan ilmu sosial. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan referensi dan panduan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berguna sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan serta mengambil kebijakan atau regulasi.

2. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi wadah bagi peneliti untuk berpikir secara ilmiah, menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah.
3. Diharapkan bahwa pembaca penelitian ini dapat memperoleh manfaat dengan mendapatkan pengetahuan, wawasan, serta referensi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis adalah suatu gambaran yang berisikan tentang konsep dasar teori yang akan digunakan sebagai landasan pendukung dari jalannya penelitian serta dapat menjelaskan keterkaitan diantara satu variabel dan variabel lainnya dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Di dalam penelitian ini, akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan telaah teori yang akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah, dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

| NO | PENELITI, JUDUL | TUJUAN | METODE | HASIL PENELITIAN |
|-----------|--|--|------------------------------|---|
| 1. | Kiki Hardiyanti & Budi Puspo Priyadi. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak | Untuk mengetahui perolehan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak | Metode Kualitatif Deskriptif | Kebijakan terkait pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada Kabupaten Demak melewati DLH belum maksimal, khususnya pengelolaan sampah pada TPA Kalikondang. |

| NO | PENELITI, JUDUL | TUJUAN | METODE | HASIL PENELITIAN |
|-----------|--|---|------------------------------|---|
| 2. | Nur Fadilla dkk. (2019). Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018. | Metode Kualitatif Deskriptif | Penerapan Jakstrada sudah dioperasikan cukup baik meskipun masih belum sempurna tetapi tidak bisa dinyatakan gagal sebab tidak ada masalah serius sehingga menyebabkan penyelenggaraannya mengalami kendala atau terhenti. |
| 3. | Regina Urai Maramis dkk. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota Manado, No. 33 Tahun 2018, Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan di Kota Manado. | Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terkini di Kota Manado yaitu Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018. | .Metode Kualitatif | Implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah belum optimal ditinjau dari pemberian sosialisasi yang tidak berpartisipasi memaparkan terkait mekanisme serta tahapan untuk menangani sampah terhadap masyarakat yang mana masih sebatas pada aktivitas seremonial dan belum dapat menjangkau secara menyeluruh. |
| 4. | Bella Dwi Hastuti. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. | Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan mengetahui faktor-faktor penghambat. | Metode Kualitatif | Penerapan kebijakan Perda 01/2017 pada Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan selaras dengan prosedur serta standar yang sudah ditentukan akan tetapi, pada penyelenggaraannya belum bisa direalisasikan secara maksimal sebagaimana isi kebijakan dan masih ada ketidaksesuaian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaannya. |

| NO | PENELITI, JUDUL | TUJUAN | METODE | HASIL PENELITIAN |
|-----------|--|---|---|---|
| 5. | Hardani Wijaya dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). | Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. | Metode Kualitatif | Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi, khususnya di daerah pelayanan sampah leuwigajah, masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari ketidakrealisasian maksud dan tujuan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut. Beberapa faktor kesuksesan masih belum sepenuhnya terpenuhi. |
| 6. | Hasbi Shiddiq Fauzan. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Garut | Untuk mengetahui strategi kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan imbas dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah. | Metode kombinasi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif | Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan memperkuat kapasitas pemimpin, mendirikan sistem informasi, melibatkan masyarakat, dan menerapkan berbagai teknik, baik yang bersifat stimulus maupun non-stimulus, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. |
| 7. | Andi Cahyadi dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. | Untuk menyelidiki implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. | Metode Kualitatif Deskriptif | Penerapan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya maksimal dilihat dari memerlukan perbaikan, dukungan seluruh pihak, serta pihak yang membuat kebijakan. Masih terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi proses penerapan kebijakan. |

| NO | PENELITI, JUDUL | TUJUAN | METODE | HASIL PENELITIAN |
|-----------|---|---|-------------------|--|
| 8. | Juriko Abdussamad dkk. (2022) . Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango | Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. | Metode Kualitatif | Proses penerapan kebijakan melewati program bank sampah di DLH Kabupaten Bone Bolango umumnya secara menyeluruh sudah optimal namun belum sempurna karena masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang efektif. |
| 9. | Dwi Wulandari dkk. (2017). <i>Waste Bank : Waste Management Model in Improving Local Economy.</i> | Untuk menjelaskan model pengelolaan sampah melalui bank sampah dan menjelaskan bagaimana rumah tangga meningkatkan kesejahteraanya. | Metode Kualitatif | Model pengelolaan Bank Sampah tidak sebatas menciptakan lingkungan yang bersih tetapi juga meningkatkan pendapatan IRT yang tinggal di sekeliling bank sampah. |
| 10. | Dyah Retno Wijayanti & Sri Suryani. (2015). <i>Waste Bank as Community-based Environmental Governance : A Lesson Learned from Surabaya.</i> | Untuk menganalisis peran bank sampah, pelibatan publik, serta menciptakan pengelolaan lingkungan yang efektif dan kolaboratif. | Metode Kualitatif | Bank sampah berbasis masyarakat mengimplementasikan budaya menjadi peranagkat lunak pada mekanisme tata kelola. Keterlibatan masyarakat yang menjadi relasi serta penggerak program pembangunan pemerintah dimana peranannya sebagai regulator, perangsang, dan fasilitator stakeholders lain harus dilaksanakan maksimal. |

Sumber : diolah dari berbagai jurnal

Penelitian ini dan penelitian yang ditunjukkan pada tabel di atas sama – sama berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah memperluas dan mengkolaborasikan dengan penelitian sebelumnya dimana perbedaan pada jurnal pertama terletak pada fokus penelitian yaitu evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak sementara penelitian ini berfokus pada implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Jurnal kedua, jurnal ketiga, dan jurnal keempat perbedaannya terletak pada teori dimana jurnal kedua, jurnal ketiga, dan juga jurnal keempat menggunakan teori George Edward III dengan melihat indikator disposisi, struktur organisasi, sumber daya, serta komunikasi. Jurnal kelima perbedaannya menggunakan teori Michael Hill dan Peter Hupe mengamati aspek-aspek seperti formasi kebijakan, ciri-ciri indikator kebijakan, proses transfer kebijakan, dampak lembaga pelaksana, relasi antar-organisasi secara horizontal, respon dari kelompok sasaran, dan faktor-faktor eksternal. Jurnal keenam perbedaannya terletak pada indikator yang digunakan dan metode dimana jurnal keenam menggunakan indikator yang terdiri dari konsistensi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipatif sedangkan metode yang digunakan *mix method* antara metode triangulasi dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis regresi sederhana dengan pendekatan kuantitatif. Jurnal ketujuh perbedaannya terletak pada teori dimana pada jurnal ketujuh ini mengadopsi teori Ripley dan Franklin. Analisis didasarkan pada indikator tingkat kepatuhan, kinerja yang diharapkan, dan kelancaran rutinitas fungsi. Jurnal kedelapan perbedaannya terletak pada indikator dimana jurnal

kedelapan melihat indikator manfaat, asas tanggung jawab, nilai ekonomi, serta berkelanjutan. Jurnal kesembilan perbedaannya terletak pada teori dimana jurnal kesembilan menggunakan teori Miles dan Huberman dengan melihat model interaktif melalui proses reduksi, tampilan (*display*), dan *verifikasi* data. Jurnal kesepuluh perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan, dimana penelitian ini mengadopsi teori normatif.

Di dalam penelitian ini, diterapkan teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho yang terdiri atas (1) ketepatan kebijakan (2) ketepatan pelaksana (3) ketepatan target (4) ketepatan lingkungan (5) ketepatan proses dan menambahkan teori Said Zainal Abidin yang terdiri dari (1) faktor utama internal dan (2) faktor utama eksternal. Lokus dari penelitian ini adalah implementasi Kebijakan dan Strategi (Jakstrada) dalam pengelolaan di Kabupaten Demak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas masalah yang muncul saat menerapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

1.5.2 Administrasi Publik

A. Dunsire (dalam Keban, 2014) mengartikan administrasi sebagai tindakan pengaturan, pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, bimbingan, penerapan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kebijakan publik, analisis, keseimbangan, dan penyajian keputusan kebijakan, baik dalam konteks pekerjaan individu maupun kelompok dalam memmanifestasikan produksi barang dan layanan publik dijadikan sebagai arena untuk studi teoritis dan akademik

Publik mencakup tiga istilah diantaranya negara, masyarakat, dan orang banyak. Menurut Anggara, (2012) mendefinisikan publik sebagai berbagai lembaga dan kegiatan yang berkenaan secara erat terhadap identitas sebuah golongan, bersama kehidupan golongan sebagai suatu kesatuan yang memiliki ciri – ciri, tata cara sendiri, normal, dan semboyan. Sedangkan menurut Jefkins (dalam Revida et al., 2020) mendefinisikan publik sebagai semua individu yang terlibat dalam berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara eksternal maupun internal. Definisi administrasi publik menurut ahli yakni :

1. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) menggambarkan bahwa administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola (mengawasi) berbagai keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.
2. Nigroho dan Nigroho (dalam Keban, 2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai kolaborasi antar kelompok di sektor publik, yang melibatkan cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang memiliki peran signifikan dalam pembuatan kebijakan publik dan merupakan bagian integral dari proses politik. Dalam konteks ini, perbedaannya dengan administrasi swasta mencakup cara beberapa kelompok individu bekerja sama untuk menyediakan layanan kepada masyarakat.
3. Barton & Chappel (dalam Keban, 2014) memberikan definisi administrasi publik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dengan penekanan pada peran individu dalam penyediaan layanan publik.

4. Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) menggambarkan administrasi publik sebagai gabungan teori dan praktik yang rumit. Sasaran dari administrasi publik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap peran pemerintah dalam masyarakat yang diatur serta mengubah kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari para ahli sebagaimana sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses koordinasi yang terkait dengan implementasi kebijakan publik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan kenegaraan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Thoha, 2008) mengatakan terkait krisis pengertian administrasi negara sehingga memerlukan pemahaman lebih dalam tentang administrasi negara melewati paradigma. Paradigma dalam administrasi negara terdiri dari :

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik – administrasi (1900 – 1926)

Paradigma ini adalah paradigma dikotomi politik – administrasi dan tokohnya adalah J. Goodnow dan Lenald D. White mengungkapkan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi utama yang berbeda antara administrasi dan politik. Politik lebih menitikberatkan pada pembuatan kebijakan atau pengembangan tujuan negara, sedangkan administrasi dipandang sebagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemisahan kekuasaan sangat ditonjolkan di paradigma ini dan badan legislatif ditambah dengan kapabilitas penafsiran dari yudikatif yang mengutarakan bahwa berbagai keinginan negara serta kebijakan

formal. Sedangkan eksekutif melakukan administrasi atas kebijakan tersebut dengan adil dan tidak condong terhadap salah satu kekuasaan politik

Menurut Goodnow dan rekan-rekannya, fokus administrasi negara seharusnya tertuju pada birokrasi pemerintahan, karena fokus paradigma 1 pada lokus, yaitu masalah menentukan lokasi administrasi negara.

2. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Paradigma ini adalah prinsip – prinsip administrasi dan tokohnya Willoughby mengungkapkan bahwa paradigma ini mengindikasikan *tren* baru terkecuali perkembangan pada sektor administrasi dimana administrator dapat menjadi ahli pada bidang pekerjaannya apabila mereka memiliki keinginan untuk mengkaji bagaimana cara menggunakan prinsip tersebut.

Fokus pada bidang ini yaitu kapabilitas berbentuk prinsip administrasi sedangkan lokusnya berkaitan dengan inti dari prinsip – prinsip tersebut. Administrasi bersifat *fleksibel* dan dapat diaplikasikan di berbagai tempat karena prinsip – prinsipnya tetap konsisten dan esensi administrasi tetap sama. Tahun 1937, Luther H Gulick dan Lyndall Urwick menyatakan bahwa prinsip – prinsip tersebut merupakan inti dari ilmu administrasi, dan tempat penerapannya tidaklah krusial. Dengan kata lain, “fokus memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan lokus”.

3. Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini melompat ke masa lalu yang bertemu dengan orang tua disiplin yaitu ilmu politik yang mengakibatkan adanya transformasi serta pembaharuan dari pengertian lokus yaitu pemerintahan serta kekurangan hubungan terhadap

fokusnya. Fase ini adalah sebuah upaya untuk mengubah kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Meskipun demikian, hasil dari upaya ini adalah tanggung jawab untuk merumuskan bidang ini, setidaknya dengan mengaitkannya secara mendasar dengan fokus keahliannya. Oleh karena itu, pada tahun 1950-an beberapa tulisan administrasi negara penekanan pembicaraannya ada terhadap wilayah kepentingan.

4. Paradigma 4 : Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Paradigma ini menganggap administrasi publik sebagai cabang ilmu administrasi. Semua konsep dalam teori organisasi dan manajemen diidentifikasi sebagai bagian dari "ilmu administrasi". Dalam konteks ilmu administrasi, penekanannya lebih pada fokus daripada lokus. Paradigma ini seringkali menawarkan metode yang sangat canggih, berdasarkan pada keahlian dan spesialisasi, tetapi tidak memberikan panduan konkret mengenai dimana bidang keahlian tersebut seharusnya diterapkan.

Di awal 1990-an, "Pengembangan Organisasi" muncul sebagai bidang spesialis dalam ilmu administrasi yang memiliki akar pada psikologi sosial dan prinsip "demokrasi" dalam birokrasi baik di sektor publik maupun swasta, serta konsep swaaktualisasi individu yang menjadi anggota organisasi

5. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970)

Paradigma ini adalah paradigma yang mempunyai fokus serta kejelasan gimana fokusnya. Fokus paradigma ini pada teori organisasi, praktika dalam analisis *public policy*, serta beberapa teknik administrasi dan manajemen yang telah

maju sementara lokusnya pada birokrasi pemerintahan dan permasalahan masyarakat (*public affairs*).

Berdasarkan pengertian paradigma administrasi publik yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi publik mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Penelitian ini menggunakan bagian paradigma 5 yang menjelaskan mengenai persoalan-persoalan masyarakat dimana salah satu persoalan-persoalan masyarakat yaitu masalah sampah.

1.5.4 Kebijakan Publik

Berbagai persoalan yang datang pada kehidupan masyarakat secara dinamis seiring dengan berkembangnya masyarakat. Administrasi publik memiliki kepentingan akan alternatif permasalahan masyarakat. Thoha (dalam Anggara, 2012) menyampaikan terkait datangnya kebijakan publik pada administrasi negara separuhnya diakibatkan oleh teknisi administrasi negara yang memposisikan diri dalam jabatan politik dan yang lainnya karena tuntutan masyarakat yang bertambah untuk meraih kebijakan optimal.

James Anderson (dalam Nugroho, 2014) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai perilaku yang cenderung stabil dan memiliki tujuan yang akan diselenggarakan oleh aktor maupun sekelompok aktor untuk menghadapi permasalahan maupun persoalan yang menjadi fokus perhatian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diciptakan oleh pemerintah ataupun pejabat publik dengan orientasi atau sasarannya kepada masyarakat luas. Sedangkan menurut AG. Subarsono (dalam Raintung et al., 2022), kebijakan publik adalah

suatu alternatif kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau pejabat publik di berbagai sektor, seperti pertahanan, industri, pertanian, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain – lain.

Dye (dalam Muadi et al., 2016) mengatakan bahwa kebijakan negara sebagai apapun keputusan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu memerlukan adanya tujuan dan bersikap objektif mencakup seluruh indakan pemerintah. Pendapat tersebut sejalan dengan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri, 2022) sebagaimana memaknai kebijakan publik yakni apa yang diutarakan untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bisa diputuskan melalui regulasi ataupun pernyataan kebijakan berupa pidato maupun wacana yang diutarakan oleh pejabat pemerintah maupun pejabat politik untuk bisa disikapi melalui beberapa program dan tindakan pemerintah.

William N. Dun (dalam Raintung et al., 2022) menyajikan definisi alternatif untuk kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Menurutnya, kebijakan publik diartikan sebagai sekumpulan keputusan yang memiliki korelasi dan dihasilkan oleh pejabat pemerintah. Sedangkan Islamy (dalam Anggara, 2012) mengatakan kebijakan publik dijelaskan sebagai serangkaian keputusan yang dapat atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang difokuskan pada tujuan khusus demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik hanya dapat ditentukan oleh pemerintah atau pihak lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses kebijakan publik, sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing. Menurut Thomas R. Dye

(dalam Suwitri, 2022), fenomena tersebut dapat dijelaskan oleh tiga aspek dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu :

1. Pemerintah memiliki otoritas dan kapabilitas tunggal dalam menentukan kebijakan secara umum yang berlaku bagi masyarakat.
2. Pemerintah adalah satu - satunya entitas yang memiliki wewenang dan kapabilitas untuk mengesahkan atau menetapkan kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara menyeluruh pada masyarakat yang menjadi sasaran.
3. Pemerintah memiliki otoritas dan kapabilitas eksklusif untuk menjalankan kebijakan secara paksa terhadap masyarakat yang menjadi sasaran.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang dijelaskan diatas maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak dari pemerintah untu meraih tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Nicholas Henry (dalam Suwitri, 2022) mengemukakan bahwa dalam mendalami kebijakan publik, kita juga perlu melihatnya dari perspektif proses, di mana proses diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari awal hingga akhir. Di dalam proses kebijakan publik Garry D Brewer (dalam Suwitri, 2022) menyusun menjadi 6 tahapan sebagai berikut :

1. Tahap *Invention/Initiation*, yang melibatkan perumusan masalah.
2. Tahap *Estimation*, yang mencakup pengusulan alternatif-alternatif.

3. Tahap *Selection*, dimana alternatif – alternatif yang ada diseleksi dan dinilai untuk memilih yang terbaik.
4. Tahap *Implementation*, yaitu penerapan kebijakan setelah mendapatkan pengesahan.
5. Tahap *Evaluation*, dimana kebijakan dinilai terlebih dahulu
6. Tahap *Termination*, yang melibatkan penyesuaian kebijakan.

Menurut Purwanto & Dyah, (2015) tahapan implementasi bagian proses kebijakan publik dalam merealisasikan tujuan dari kebijakan dimana tahap implementasi seringkali dinyatakan menjadi tahap krusial karena tahap ini sebagai “jembatan” dari realita dengan konsep sebagaimana pendapat Grindle (dalam Purwanto & Dyah, 2015) yang menyebutkan bahwa implementasi yang dimaksud adalah konsep yang tercermin pada situasi ideal, harapan untuk mewujudkan sesuatu sejalan dengan formulasi dalam dokumen kebijakan merupakan bagian dari realitas kehidupan masyarakat. Di dalam dunia nyata, masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan berjuang menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik.

1.5.6 Implementasi Kebijakan Publik

Maulana & Nugroho (dalam Raintung et al., 2022) mengatakan bahwa implementasi kebijakan ialah suatu tahap mekanisme kebijakan sesudah proses perumusan kebijakan publik. Tahap implementasi memegang peranan penting dalam jalannya suatu kebijakan, menentukan apakah pelaksanaannya berjalan lancar atau mengalami kendala.

Menurut Nugroho, (2014) mengatakan dimana implementasi kebijakan secara prinsip adalah metode supaya suatu kebijakan bisa meraih tujuannya tidak lebih maupun tidak kurang. Terdapat dua opsi tahapan yang ada buat mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung menerapkan berupa program ataupun melalui formulasi/rumusan kebijakan derivat ataupun turunan dari kebijakan publiknya.

Menurut Wahab (dalam Anggara, 2012), implementasi kebijakan yakni sebuah mekanisme untuk menyelenggarakan keputusan dari kebijakan yang umumnya berbentuk peraturan pemerintah, undang – undang, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden sedangkan Van Meter dan Horn (dalam Herabudin, 2016) mengutarakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sektor pemerintah, swasta, serta aparatur negara, bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh kebijakan publik.

Di dalam aplikasi lapangan, suatu kebijakan yang hendak diselenggarakan juga memerlukan kerjasama atau koordinasi karena masalah yang ditanganinya begitu rumit seperti menurut Dunn (dalam Tjilen, 2015) yang mengatakan bahwa *policy implementation* (pelaksanaan kebijakan) yaitu aktivitas dalam melaksanakan kebijakan, cakupannya terkait implementasi dari berbagai program dan seringkali mendatangkan masalah yang sangat rumit dan membutuhkan tindakan berssama. Hal tersebut dikarenakan implementasi kebijakan juga membutuhkan koordinasi.

Menurut Nugroho, (2014) dalam bukunya “*Public Policy*” mengutarakan bahwa ada 5 “tepat” yang harus dipenuhi berkaitan dengan keefektifan implementasi kebijakan. Adapun keektifan tersebut terdiri dari :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut menyeluruh dalam menangani berbagai aspek yang sebenarnya menjadi inti permasalahan yang harus diselesaikan. Selain itu, penilaian juga melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian cara penyusunan kebijakan dengan sifat masalah yang ingin diatasi. Pertanyaan kunci mencakup apakah kebijakan mencakup semua aspek yang relevan dan apakah penyusunnya memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan misi lembaga yang membuat kebijakan tersebut.

2. Ketepatan Pelaksana

Pemerintah, kolaborasi antar instansi pemerintah, serta partisipasi dari masyarakat atau sektor swasta, semuanya merupakan tiga lembaga yang dapat berfungsi sebagai pelaksana dalam hal ketepatan pelaksana.

3. Ketepatan Target

Terdapat tiga faktor yang memengaruhi ketepatan target. Pertama, pertimbangan apakah target intervensi sesuai dengan rencana intervensi, tidak bersinggungan dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan intervensi lainnya. Kedua, evaluasi apakah target berada dalam kondisi yang siap untuk diintervensi, dimana kesiapan tidak hanya mencakup aspek alami tetapi juga terkait dengan apakah situasi sasaran sedang dalam konflik atau damai. Ketiga, penilaian apakah intervensi terkait dengan penerapan kebijakan baru atau penyegaran implementasi sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Dalam konteks ini, ketepatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan kebijakan (lingkungan internal) dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal melibatkan interaksi antara pelaksana dan perumus kebijakan dengan lembaga terkait lainnya. Donald J. Calista mengidentifikasi variabel endogen dalam lingkungan kebijakan, termasuk *authoritative arrangement* yang terkait dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang menyangkut komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berhubungan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang merumuskan kebijakan dengan jejaring yang terlibat dalam implementasinya.

Lingkungan eksternal kebijakan terdiri dari variabel eksogen yang dijelaskan oleh Calista yang mencakup persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasinya, *interpretive institutions* yang terkait dengan penafsiran lembaga strategis dalam masyarakat seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan media massa dalam mengartikan kebijakan serta implementasinya, serta beberapa individu tertentu yang dapat memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan melaksanakannya.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses umumnya dijalankan melalui tiga tahap, yang pertama adalah tahap pemahaman kebijakan. Pada tahap ini, masyarakat memandang kebijakan sebagai suatu peraturan, sementara pemerintah melihatnya sebagai suatu tugas

yang harus dijalankan. Tahap kedua adalah penerimaan kebijakan, dimana masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu aturan, sementara pemerintah menerima kebijakan sebagai suatu tugas yang perlu diimplementasikan. Tahap ketiga berkaitan dengan kesiapan strategis, dimana masyarakat bersiap untuk melaksanakan atau terlibat dalam kebijakan, sementara birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan publik diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian dari proses kebijakan publik yang mencakup suatu tindakan yang dilaksanakan secara bersama guna mencapai keefektifan dari pelaksanaan program.

1.5.6.1 Model – Model Implementasi Kebijakan ‘

Beberapa faktor berkaitan satu sama lain dan berdampak pada bagaimana kebijakan atau program dijalankan bisa mempengaruhi implementasi kebijakan.. Para ahli implementasi kebijakan menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh yaitu :

A. Teori Goggin et al (1990)

Goggin et al (dalam Purwanto & Dyah, 2015) menyatakan bahwa pemerintah pusat mengirimkan kebijakan sebagai “pesan” kepada pemerintah daerah yang terdiri dari 3 hal meliputi :

1. Isi Kebijakan

- a. Keterlibatan publik : tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Keterlibatan publik dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan menciptakan dukungan masyarakat.

- b. Sumber daya : ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, seperti SDM dan teknologi, memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang memperhitungkan sumber daya yang tersedia memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil.
- c. Manfaat kebijakan : kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat konkret dan relevan bagi masyarakat lebih mungkin diterima dan diimplementasikan secara efektif

2. Format Kebijakan

- a. Konsistensi kebijakan : konsistensi antara kebijakan yang diumumkan dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikannya penting untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan di kalangan pihak terkait.
- b. Frukuenasi : tingkat perubahan atau revisi kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Perubahan terlalu sering dapat menciptakan kekacauan dan ketidakpastian.
- c. Kejelasan kebijakan : kebijakan yang dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait memiliki kemungkinan lebih besar untuk diimplementasikan dengan sukses.
- d. Penerimaan isi kebijakan : penerimaan dan dukungan pihak-pihak terkait terhadap isi kebijakan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi.

3. Reputasi Aktor

- a. Kredibilitas : kredibilitas aktor, terutama pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kredibilitas dapat dibangun melalui konsistensi tindakan dan transparansi.
- b. Legitimasi : legitimasi aktor pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan juga menjadi faktor penting. Dukungan masyarakat dan legitimasi politik dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif.

B. Teori Grindle (1980, 1981)

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2020), efektivitas pelaksanaan kebijakan publik dapat diukur melalui tingkat implementasi, yang mencakup konteks kebijakan dan isi kebijakan.

1. Isi Kebijakan (*Content of policy*) menurut Grindle terdiri dari :

a. Kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi

Berbagai kepentingan sebagaimana mempengaruhi berkenaan dengan kepentingan lainnya yang berpengaruh terhadap sebuah penerapan kebijakan di mana faktor ini mempunyai argumen bahwa sebuah kebijakan pada penyelenggaraannya pasti mengikutsertakan berbagai kepentingan dan sebagai pajak kepentingan itu berdampak kepada implementasinya.

b. Jenis manfaat

Jenis manfaat berusaha untuk membuktikan atau memaparkan bahwa suatu kebijakan perlu ada berbagai jenis manfaat yang memperlihatkan dampak

postif yang timbul dari proses implementasi kebijakan yang akan diselenggarakan.

c. Perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan memiliki sasaran yang ingin dijelaskan dalam bagian ini, menunjukkan bahwa setiap perubahan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan harus memiliki skala yang terperinci, tidak memedulikan seberapa besar transformasinya.

d. Situs pengambilan keputusan

Diambilnya keputusan pada sebuah kebijakan mempunyai peranan yang krusial untuk menyelenggarakan sebuah kebijakan Oleh sebab itu dalam bagian ini harus dipaparkan terkait posisi pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan yang hendak diterapkan.

e. Pelaksana kebijakan

Penyelenggaraan sebuah kebijakan ataupun program perlu ditopang dari penyelenggara kebijakan yang berpengalaman dan ahli demi kesuksesan sebuah kebijakan dan perlu tertata baik di bagian ini.

f. Sumber daya

Penyelenggaraan sebuah kebijakan perlu ditopang oleh berbagai sumber daya yang bisa menopang kelancaran pelaksanaannya.

2. Konteks kebijakan (*Context of policy*) menurut Grindle terdiri dari :

a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat

Dalam kebijakan, perlu dihitung dengan cermat juga kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para pelaku kebijakan agar

pelaksanaannya berjalan lancar. Jika hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik, maka pelaksanaan program atau kebijakan yang dimaksud dapat mengalami ketidakefektifan.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan diselenggarakan dan berdampak kepada kesuksesannya. Oleh sebab itu bagian ini hendak menjelaskan terkait karakteristik sebuah lembaga yang akan berpengaruh terhadap kebijakan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hal lainnya yang dinilai penting pada penyelenggaraan sebuah kebijakan yakni respon dan kepatuhan dari para pelaksana, maka di bagian ini akan dijelaskan mengenai sejauhmana respon dan kepatuhan dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

C. Teori Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari 6 variabel yang saling berkaitan, diantaranya adalah :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja dari implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana tingkat keberhasilannya, tergantung pada realitas ukuran dan tujuan kebijakan yang sesuai dengan konteks sosio-kultural tingkat pelaksanaan. Sebaliknya, jika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu

dikehendaki untuk dijalankan di tingkat masyarakat, mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik akan menjadi sulit.

2) Sumber daya

Kesuksesan mekanisme implementasi kebijakan begitu bergantung pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan manusia dianggap sebagai elemen kunci untuk mencapai kesuksesan tersebut. Di samping itu, di luar sumber daya manusia, perlu didukung sumber daya non-manusia, seperti waktu, keuangan, dan fasilitas.

3) Karakteristik lembaga pelaksana.

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan terdiri dari organisasi formal dan informal. Kinerja implementasi kebijakan oleh keduanya dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan relevan dengan sifat masing – masing organisasi sebagai agen pelaksana. Hal tersebut berkenaan terhadap konteks dari diaplikasinya kebijakan. Sedangkan penentuan organisasi agen pelaksana dipengaruhi oleh cakupan luas wilayah pelaksanaan kebijakan.

4) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan mungkin dapat berupa penerimaan dan penolakan dan hal tersebut bisa berdampak pada keberhasilan maupun kegagalan dari implementasi kebijakan sebab kebijakan diselenggarakan bukanlah hasil buatan dari masyarakat setempat yang memahami secara benar permasalahan di daerah mereka. Terdapat beberapa elemen respon yang mampu mempengaruhi sikap para pelaksana untuk menerima dan melaksanakan kebijakan, yaitu: 1) pemahaman, pendalaman, serta

pengetahuan terhadap suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 2) tanggapan dari para pelaksana (penerimaan atau penolakan). 3) intensitas reaksi terhadap kebijakan.

5) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Setiap implementasi kebijakan pastilah memiliki standar maupun tujuan kebijakan. Standar maupun tujuan kebijakan sangat diperlukan dan penting untuk dikomunikasikan dengan baik bersama para pelaksana, kemudian dipahami oleh semua pelaksana kebijakan.

6) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi

Di dalam implementasi kebijakan terdapat faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung hadir dan jalannya suatu kebijakan. Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Kondisi faktor eksternal yang kurang atau bahkan tidak mendukung implementasi kebijakan dapat menjadi penyebab kegagalan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian teori dari para ahli diatas, peneliti akan menggunakan teori Riant Nugroho untuk melihat implementasi kebijakan yang berfokus pada tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Selain itu, pada penelitian ini juga menambahkan teori menurut said zainal abidin untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang berfokus faktor utama internal dan faktor utama eksternal..

1.5.7 Pengertian Sampah

Sampah yakni sisa dari kegiatan kesehataian yang bentuknya padat, didalam pengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya telah dilakukan berbagai usaha

karena dengan mengolah sampah tersebut sejak awal sampah tersebut datang bisa meminimalisir total liburan sampah dan biaya dari transportasi untuk mengangkut sampah bisa ditekan serta pada akhirnya bisa membuat umur lokasi TPA menjadi berjangka panjang (Rosmala et al., 2020).

Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan jenis sampah spesifik lainnya. Sedangkan dampak sejenisnya itu mencakup sampah yang datang dari lokasi industri, khusus, komersial, fasilitas baik sosial maupun umum dan lainnya. Sampah tersebut menjadi sebuah kendala tinggi oleh pemerintah dalam melaksanakan pengolahan sampah supaya tidak ada penumpukan sampah. Menurut asalnya sampah terbagi sebagai berikut :

1. Sampah sebagai perolehan buangan rumah tangga mencakup sampah untuk membungkus makanan. Tanpa biasa dan membungkus perabotan serta sisa sampah lain
2. Sampah hasil buangan dari pasar dan tempat umum lainnya seperti sampah sisa makanan dan taman.
3. Sampah di jalan seperti debu atau ssia tumbuhan / bangkai hewan serta kotoran.
4. Sampah industri mencakup diantaranya debu dan air dari limbah serta sisa bahan baku maupun bahan jadi dan lainnya.

Kategori sampah yakni:

1. Sampah organik yakni sampah tercakup sisa bahan makanan maupun pembungkus lain, keseluruhan ini dikenal menjadi sampah baik pasar maupun industri dari bahan makanan.

2. Sampah anorganik yakni mencakup sampah kategori logam, gelas, plastik dan lainnya dan umumnya mencakup hancur sampah tidak bisa dihancurkan mikroorganisme.

1.5.8 Pengelolaan Sampah

Sebuah bahan dasar untuk mengolah sampah dan negara Indonesia adalah UU 18/2008 tentang pengelolaan sampah dimana mengutarakan bahwa proses pengelolaan tersebut dilakukan secara runtut dan menyeluruh dan berkaitan satu sama lainnya mencakup diantaranya penanganan serta pengurangan sampah. Saat ini pemerintah fokus terhadap implementasi PP 97/2017 dan untuk Kabupaten Demak terdapat Perbup Demak nomor 58/2018 atau selanjutnya disebut Jakstrada. Jakstrada memuat dua hal, diantaranya adalah :

- 1) Arah dari kebijakan terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta jenis sampah sejenisnya.
- 2) Strategi, target, dan program terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta jenis sampah sejenisnya.

Pada penelitian ini, akan fokus terhadap arah dari kebijakan terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta jenis sampah sejenisnya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah perancangan yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengeksplorasi masalah melalui pengumpulan data dan informasi terkait implementasi kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Operasionalisasi konsep adalah perancangan yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengeksplorasi masalah melalui pengumpulan data dan

informasi terkait. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori lima tepat dalam keefektifan implementasi kebijakan dari Riant Nugroho (2014) dan menambahkan teori dari Said Zainal Abidin (2019) dengan menggunakan dua indikator. Penggunaan teori tersebut yang paling sesuai jika diterapkan saat turun di lapangan.

1.6.1 Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak

1. Ketepatan Kebijakan

Memecahkan masalah. Memecahkan masalah dalam penelitian ini guna melihat implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak sudah atau belum memecahkan masalah persampahan seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, kurangnya partisipasi masyarakat, TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, tingginya angka timbulan sampah, serta keterlambatan pengangkutan.

2. Ketepatan Pelaksana

- a) Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam penelitian ini guna melihat apa saja peran dari pemerintah dan mengetahui peran pemerintah sudah berkaitan dengan sampah atau tidak.
- b) Peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penelitian ini guna melihat apa saja peran dari masyarakat dan mengetahui peran pemerintah sudah berkaitan dengan sampah atau tidak.
- c) Peran swasta. Peran swasta dalam penelitian ini guna melihat apa saja peran dari swasta dan mengetahui peran swasta sudah berkaitan dengan sampah atau tidak.

3. Ketepatan Target

- a) Ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran dalam penelitian ini dilihat melalui implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak sudah sesuai dengan sasaran yang direncanakan atau belum, apakah terdapat tumpang tindih, dan apakah berpotensi bertentangan dengan kebijakan lain atau tidak.
- b) Kesiapan sasaran. Kesiapan sasaran dalam penelitian ini dilihat melalui sasaran siap diintervensi atau tidak, kondisi sasaran berada dalam konflik atau keadaan damai, serta apakah sasaran mendukung atau menolak pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.
- c) Kondisi Kebijakan. Kondisi kebijakan dalam penelitian ini dilihat melalui implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak, apakah bersifat inovatif atau menggantikan/melanjutkan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

- a) Lingkungan internal. Lingkungan internal dalam penelitian ini dilihat melalui interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang berkaitan dengan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.
- b) Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilihat melalui persepsi publik terhadap kebijakan, terutama dukungan kelompok

Sasaran yang memiliki peran penting terhadap pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

5. Ketepatan Proses

- a) Pemahaman. Pemahaman dalam penelitian ini dilihat melalui pemahaman para pelaksana kebijakan pada pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.
- b) Penerimaan. Penerimaan dalam penelitian ini dilihat melalui penerimaan para pelaksana kebijakan pada pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.
- c) Kesiapan. Kesiapan dalam penelitian ini dilihat melalui kesiapan para pelaksana pada pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

1.6.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak

1. Faktor Utama Internal

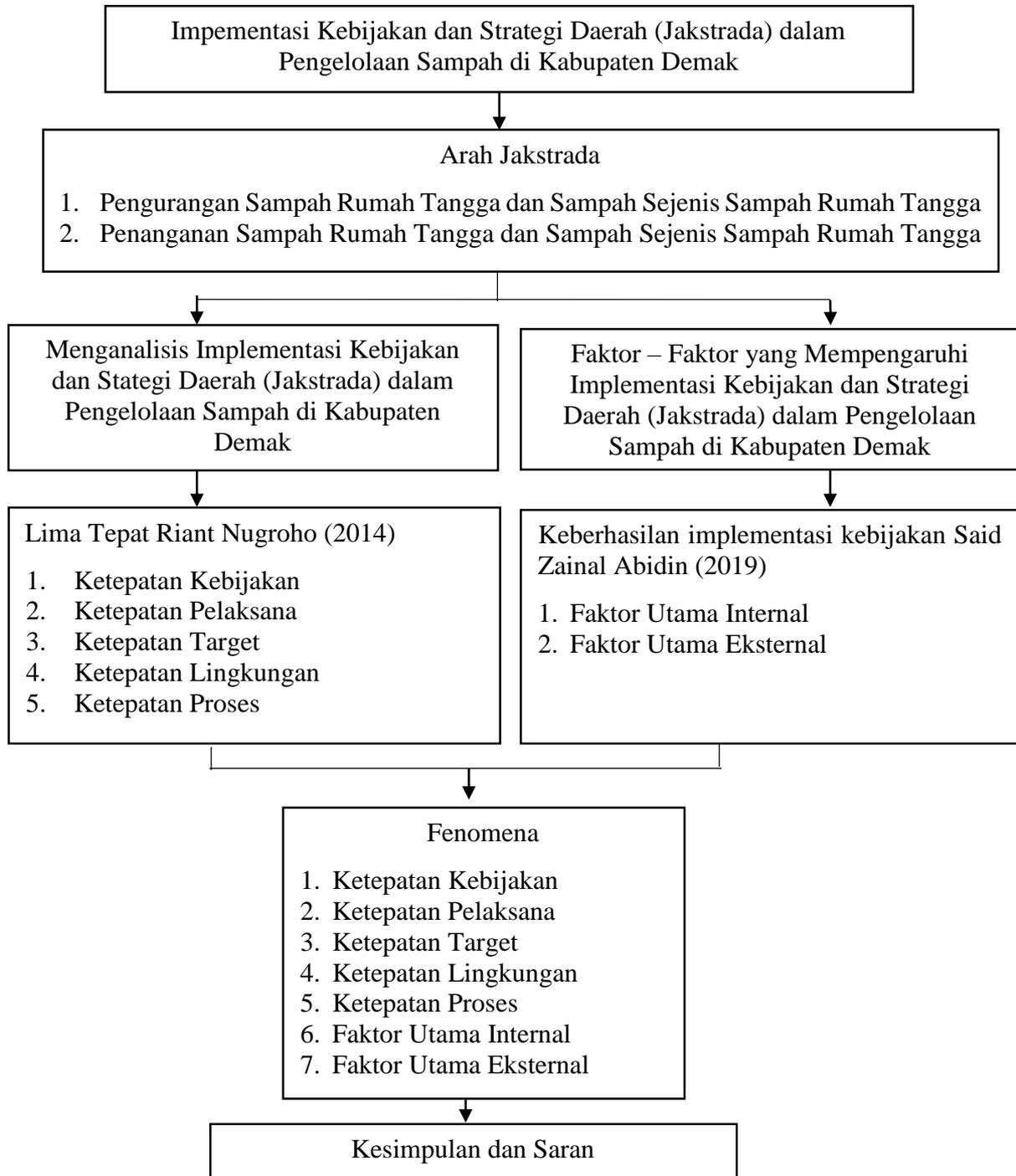
Faktor utama internal. Faktor utama internal dalam penelitian ini akan dilihat melalui kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor – faktor pendukung terkait implementasi Jakastrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

2. Faktor Utama Eksternal

Faktor utama eksternal. Faktor utama eksternal dalam penelitian ini akan dilihat melalui kondisi lingkungan dan pihak – pihak terkait implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

Gambar 1.4

Kerangka Berpikir



Sumber : Analisis Peneliti, 2023

1.7 Argumen Penelitian

Kabupaten Demak, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah dengan baik. Implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah masih ditemukan permasalahan, seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, kurangnya partisipasi masyarakat, TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping*, penggunaan plastik yang semakin marak dimana hal ini dapat menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat, serta keterlambatan pengangkutan sampah karena terbatasnya armada. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran pada lingkungan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mencapai tujuan atau manfaat tertentu. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Pendekatan metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan :

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, dimana penelitian tersebut berusaha untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau subjek penelitian. Dalam penelitian mengenai implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak bertujuan untuk mengamati permasalahan yang terjadi melalui proses pengumpulan data.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Demak, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan dari pengamatan peneliti bahwa berdasarkan sumber berita terpercaya masih ditemukan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Selain itu, pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan biaya, waktu, dan letaknya yang strategis serta mudah dijangkau oleh peneliti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Teknik yang dilakukan dalam menentukan informan yaitu *purposive*, di mana dipilih secara sengaja orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi relevan untuk diwawancarai terkait dengan permasalahan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Subjek dalam penelitian ini diantaranya Bapak Sudarwanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas, Bapak Agus Suwondo selaku Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Bapak Kusrin selaku Koordinator TPA, serta Ibu Eko Cahyono, Ibu Umi Umanah, Ibu Sri Purwanti selaku tokoh masyarakat.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak adalah data kualitatif. Jenis data penelitian kualitatif mencakup informasi yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, bukan melibatkan angka. Dalam memperoleh data kualitatif, metode pengumpulan data dapat melibatkan dokumentasi, wawancara, dan observasi.

1.8.5 Sumber Data

Implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak melibatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung atau observasi dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Berkaitan informan pada penelitian implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Koordinator TPA, serta beberapa masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder didapat secara tidak langsung dari lapangan, melibatkan penggunaan sumber informasi, seperti kepustakaan, media elektronik dan internet, serta jurnal yang berkaitan dengan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dilaksanakan dari berbagai tempat, berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Beberapa contoh tempat yang dapat digunakan untuk pengumpulan data termasuk lingkungan alam, di rumah bersama berbagai responden dan sebagainya. Sumber primer dan sekunder dapat digunakan untuk pengumpulan data berdasarkan sumber data. Dalam hal metode pengumpulan data, ada beberapa pilihan, seperti wawancara, kuesioner (angket), observasi

(pengamatan), atau kombinasi ketiganya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yakni suatu proses interaksi langsung yang ditunjukkan terhadap informan di lokasi penelitian, seperti Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas, Koordinator TPA, serta beberapa masyarakat. Di dalam penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara, sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan menjadi data pendukung bagi pelaksanaan penelitian.

2. Observasi

Observasi yakni suatu mekanisme yang telah disusun dari beberapa mekanisme biologis maupun psikologis dimana yang paling penting ialah berbagai proses ingatan maupun pengamatan. Di dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung pada pelaksanaan implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai catatan yang ada pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Demak dan juga berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Penerapan metode ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data yang lebih rinci dan tepat, serta dapat menjadi pendukung bagi hasil dari wawancara dan observasi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan setelah penyelesaian pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian mengenai implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak, digunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini melibatkan deskripsi dari data yang diperoleh melalui dokumen dan survei di instansi serta lapangan. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) mengutarakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif secara langsung dan interaktif hingga data dianggap sudah mencapai titik kejenuhan, yang mencakup langkah – langkah berikut :

a. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dalam rentang waktu berhari-hari atau berbulan-bulan, bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data.

b. Reduksi Data

Reduksi data yakni memfokuskan dan meringkas berbagai hal penting yang berkenaan dengan implementasi kebijakan ini.

c. Penyajian Data

Penyajian data yakni aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan unsur informasi secara singkat baik berupa hubungan kategori ataupun bagan sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang didapat terkait pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penelitian ini.

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kesimpulan awal yang bersifat sementara, yang dapat mengalami perubahan jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya melalui tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut tetap konsisten dan terbukti benar melalui proses berikutnya, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

1.8.8 Kualitas Data

Menurut Sugiyono, (2018) terdapat beberapa macam pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Pada penelitian ini menggunakan salah satu cara pengujian kredibilitas yaitu :

1. Triangulasi

Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2018), *cross validation* bersifat kualitatif. Dengan menilai kecukupan data berdasarkan kovergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. Dalam pengujian kredibilitas ini, triangulasi didefinisikan sebagai pengujian data dari hal – hal berikut :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa keandalan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan strategi untuk menilai keandalan data, di mana berbagai metode digunakan untuk mengevaluasi informasi yang berasal dari sumber yang sama.

c. Triangulasi waktu

Kredibilitas data dapat diuji melalui wawancara, observasi, atau metode lain yang diterapkan dalam berbagai situasi atau waktu. Jika pemeriksaan mengindikasikan ketidaksesuaian data, proses pemeriksaan perlu diulang secara berulang hingga kepastian terhadap data dapat ditemukan.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mana pada penelitian ini membutuhkan validasi kebenaran yang diperoleh melalui beberapa sumber yang meliputi melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan, melakukan observasi terkait implementasi Jakstrada dalam pengelolaan sampah, serta dokumentasi pribadi terkait penelitian.